

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi tantangan serius terkait dengan ketidakpastian ekonomi dan membutuhkan pendekatan jangka panjang untuk penanganannya. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk standar hidup tertentu. Kemiskinan lahir dengan keterbatasan orang-orang tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks di dunia, terutama di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia (Muhammad Farhan et al., 2023).

Istilah kemiskinan muncul ketika ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum atau memenuhi kebutuhan secara dasar mencakup pakaian, makanan, dan tempat tinggal sesuai dengan tingkat kelayakan hidup (Dita et al., 2022). Setiap wilayah maupun provinsi memiliki faktor-faktor kemiskinan yang berbeda dilihat dari pengukuran, persentase, dan jumlahnya. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dan sebagai suatu ukuran agregat di suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan (Michael & Smith, 2011).

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi ada beberapa, dimensi diantaranya dimensi sebagai kurangnya kesempatan, kurangnya pemberdayaan, dan kurangnya keamanan (Isnaini & Nugroho, 2020). Dari sisi

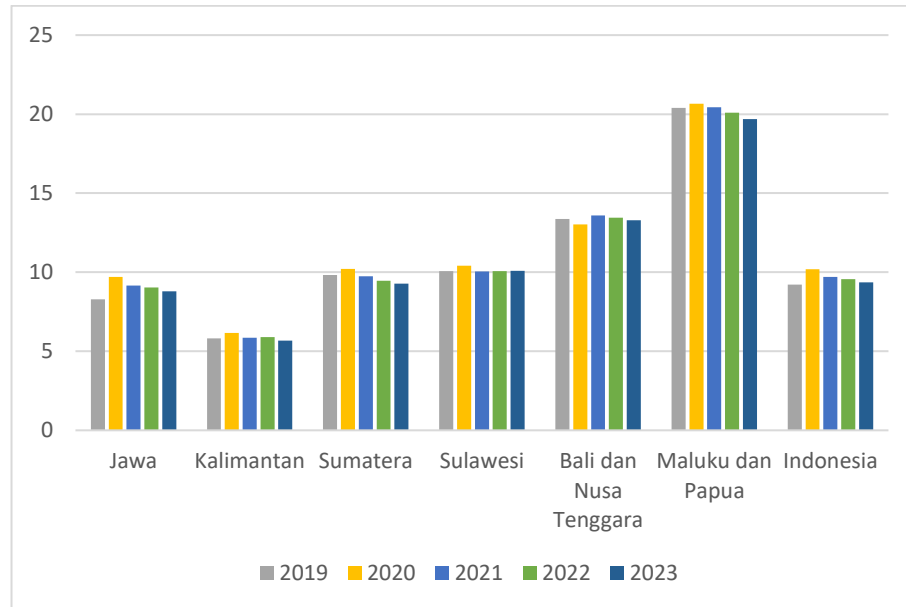
ekonomi penyebab kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah mempengaruhi upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam akses modal (Kuncoro, 1997) dalam (Masnunah et al., 2022).

Menurut BPS dalam (Bappenas, 2008:12) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimum yang layak, mencakup kebutuhan dasar makanan yang setara 2.100 kilo kalori/orang/hari dan non-makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang/jasa lainnya. Tingkat kemiskinan ini diukur dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang disusun dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, yang pada tahun 2023 sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp408.552 (74,21%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.141.936 (25,79%) Badan pusat statistik (2023).

Keberhasilan suatu wilayah dalam pembangunan dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu terkait kemiskinan, jika kemiskinan semakin rendah maka program pembangunan di suatu wilayah tersebut telah berhasil meningkatkan

kesejahteraan hidup penduduk miskin atau dapat mengurangi penduduk miskin

Susanti, E. (2017).



Gambar 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 5 tahun terakhir (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada gambar 1.1 menggambarkan tingkat kemiskinan di 6 pulau utama Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perbedaan signifikan dalam tren kemiskinan di berbagai wilayah. Papua, dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara semua pulau, menunjukkan penurunan lambat dari 20,39% pada tahun 2019 menjadi 19,68% pada tahun 2023, menandakan tantangan kemiskinan yang berkelanjutan. Bali dan Nusa Tenggara memulai dengan angka 13,36% pada tahun 2019, mengalami penurunan sementara menjadi 13,03% pada tahun 2020, namun kemudian meningkat kembali menjadi 13,29% pada tahun 2023, mencerminkan ketidakstabilan dalam perbaikan kondisi kemiskinan. Sulawesi menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif stabil namun berfluktuatif, dari 10,07% pada tahun

2019 menjadi 10,08% pada tahun 2023 menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Di susul dengan kemiskinan di pulau sumatera pada tahun 2019 9,82% menjadi 10,22% pada 2020 menunjukkan tren negatif yang mirip dengan Sulawesi. Pulau Jawa pada tahun 2019 bernilai 8,29% pada 2021 menjadi 8,79% pada 2023. Kalimantan, dengan tingkat kemiskinan terendah di antara pulau-pulau lain, tetapi relatif stabil meskipun mengalami sedikit peningkatan dari 5,81% pada 2019 menjadi 5,9¹% pada 2023, menandakan kondisi kemiskinan yang lebih terkelola. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan disparitas yang jelas dalam tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan beberapa pulau menunjukkan perbaikan yang efektif, sementara yang lain masih menghadapi tantangan signifikan.

Indonesia menempati peringkat keempat dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia 21 Oktober 2024 adalah 284.170.541 jiwa, jumlah ini setara dengan 3,47% dari total penduduk dunia (Worldometers, 2023). Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia dan di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar ke-13 di dunia berdasarkan wilayah daratan selain pulau Jawa, beberapa pulau dengan penduduk terbanyak di dunia adalah Honshu, Jepang, Britania Raya, Luzon, Filipina, Sumatera, Madagaskar, dan Mindanao. Pulau Jawa memiliki luas wilayah 127.569 km² dan dikelilingi oleh Laut Jawa dan Samudera Hindia. Jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2024 berjumlah 157.393.610 jiwa, atau setara 5,93% dari total penduduk Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau dengan

kepadatan penduduk paling padat di Indonesia. Pulau Jawa menjadi rumah bagi lebih dari 56% penduduk Indonesia dengan total sekitar 157,18 juta orang menurut data (Nabilah Muhammad, 2024).

Masalah kemiskinan di Indonesia sering kali berhubungan erat dengan faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk yang tinggi, dan rasio ketergantungan yang tidak menguntungkan, yang memperburuk kondisi ekonomi dan memperlambat proses pembangunan (Bappenas, 2021).

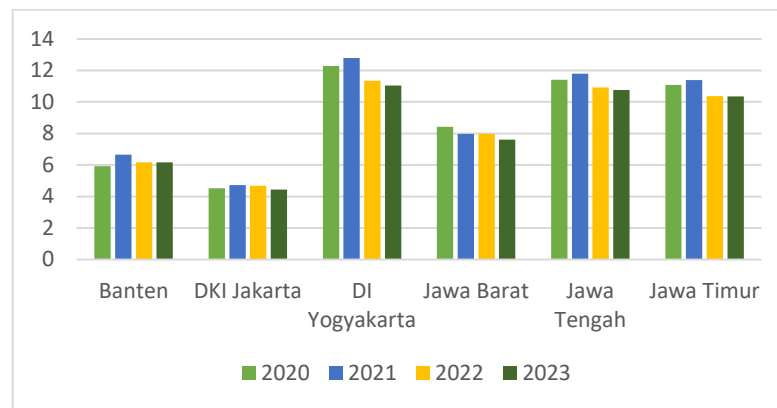
Selain itu, tingkat urbanisasi yang tinggi di Pulau Jawa memainkan peran penting dalam menurunkan kemiskinan. Urbanisasi membuka akses bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan formal yang lebih stabil, pendidikan yang lebih baik, serta layanan kesehatan yang lebih memadai (Akita, T., & Miyata, S. 2013).

Pulau Jawa merupakan wilayah sentral Indonesia yang menjadi pusat perekonomian dan banyak tercipta lapangan pekerjaan. Meskipun Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian di Indonesia, namun permasalahan kemiskinan di Pulau Jawa masih sangat krusial yang hingga masih dalam proses upaya mengentaskan kemiskinan. Pulau Jawa sampai yang saat ini masih menjadi pulau yang mengalami kemiskinan cukup tinggi. Lebih dari separuh penduduk miskin berada di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan padatnya penduduk di Pulau Jawa dan kemiskinan masing-masing Provinsi di Pulau Jawa masih cukup tinggi (Ridzky Giovanni, 2018).

Pulau Jawa meliputi enam provinsi besar diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Kemiskinan yang terjadi pada masing-masing provinsi pastinya berbeda. Berikut dibawah ini

gambaran penduduk miskin di enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2020 sampai 2023.

Berikut adalah data persentase dari berupa jumlah penduduk miskin pada masing-masing Provinsi di Pulau Jawa yang dapat kita dilihat dibawah ini pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.2
Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan gambar 1.2, tingkat kemiskinan di enam provinsi Pulau Jawa, DKI Jakarta menunjukkan tingkat kemiskinan terendah di antara semua provinsi, dengan penurunan konsisten dari 4,53% pada 2020 menjadi 4,44% pada 2023, mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. DI Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, menurun dari 12,28% pada 2020 menjadi 11,04% pada 2023, tetapi tetap tinggi, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan ekonomi lokal dan akses terbatas ke layanan dasar. Jawa Barat mengalami penurunan kemiskinan stabil, dari 8,43% pada 2020 menjadi 7,62% pada 2023, berkat kebijakan ekonomi dan investasi infrastruktur. Jawa Tengah menunjukkan penurunan bertahap dari 11,41% pada 2020 menjadi 10,77% pada 2023, tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi, mengindikasikan tantangan

berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan. Jawa Timur juga mengalami penurunan dari 11,09% pada 2020 menjadi 10,35% pada 2023, namun tingkatnya tetap relatif tinggi. Banten menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan dari 5,92% pada 2020 menjadi 6,66% pada 2021, kemudian menurun menjadi 6,17% pada 2023, mencerminkan tantangan dalam stabilisasi kemiskinan. Meskipun beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, berhasil mengurangi tingkat kemiskinan, provinsi lain seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih menghadapi tantangan signifikan dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Fluktuasi di Banten menunjukkan kesulitan dalam mencapai stabilitas kemiskinan. Perbedaan ini menyoroti bahwa kebijakan ekonomi, investasi infrastruktur, dan kondisi sosial-ekonomi yang bervariasi mempengaruhi pengentasan kemiskinan di masing-masing provinsi.

Sebaran penduduk yang tidak merata dapat mendorong terjadinya urbanisasi karena daya tarik perkotaan. Urbanisasi sendiri merupakan fenomena yang terjadi ketika masyarakat ingin melakukan perubahan dalam hidup mereka seperti bisnis, fasilitas sosial maupun budaya. Pulau Jawa merupakan pusat urbanisasi di Indonesia. Pada tahun 2023, Jakarta memiliki populasi terbanyak di Indonesia, yaitu 10 juta penduduk. Studi empiris tentang konsep urbanisasi dapat dilihat dari persentase penduduk perkotaan dengan konsep kemiskinan yang dapat dilihat dari pendapatan perkapita dapat dibagi menjadi dua sisi argument (Acosta et al., 2017). Pertama pembuktian hubungan urbanisasi dengan kemiskinan dapat dilakukan dengan pendekatan bivariate tanpa mempertimbangkan variabel penggabungan lain. Kedua pembuktian hubungan urbanisasi dengan kemiskinan dilakukan dengan

pendekatan multivariate yang melibatkan variabel-variabel lain seperti pembangunan ekonomi. Cobbinah et al., (2015) menyatakan bahwa urbanisasi pada dasarnya mampu mengurangi kemiskinan global secara agregat. Kebijakan pembangunan masalalu yang terlalu bias ke pulau jawa telah membentuk pola urbanisasi yang timpang dimasa sekarang, fakta tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Asumsinya penduduk, akan melakukan migrasi menuju wilayah yang lebih maju untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya (Zara Khadijah et al., 2020).

Urbanisasi di Indonesia terjadi karena berbagai faktor di antaranya seperti kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Fasilitas kota yang memadai serta standar hidup yang tinggi menjadi faktor penarik (Widiawaty, M.A. 2023). Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah meningkat dari 14% pada tahun 1960 menjadi 56% pada tahun 2020 serta diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pada tahun 2050 menjadi 68% penduduk akan tinggal di kota, perpindahan masyarakat desa ke kota ini disebabkan oleh globalisasi, kemudahan hidup dengan adanya pusat pembelanjaan, sekolah, dan fasilitas yang lebih baik di kota. Sebagian wilayah Di Pulau Jawa telah berubah menjadi wilayah perkotaan, termasuk wilayah Pantai Utara Jawa, mulai dari Jakarta hingga Cirebon. Berdasarkan data 65,5% wilayah di Pulau Jawa merupakan desa perkotaan perubahan status desa menjadi perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti globalisasi. Urbanisasi memiliki dampak bagi wilayah perkotaan,

salah satunya yaitu semakin sempitnya lahan tanah permukiman di perkotaan (PBB, 2018).

Penelitian Jayanthakumaran et al. (2020) menjelaskan lebih lanjut terkait efek penurunan kemiskinan yang ditimbulkan oleh migrasi penduduk di Indonesia. Pertama, efek penurunan kemiskinan lebih tinggi terjadi pada migran yang bergerak di dalam kabupaten atau kota tertentu, dengan kata lain menunjukkan bahwa semakin dekat jarak perpindahan akan semakin tinggi efek penurunan kemiskinan. Hal ini tampaknya sesuai dengan prediksi teoretis yang menyatakan bahwa semakin jauh jarak perpindahan, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan semakin besar hambatan untuk bermigrasi. Migrasi ke daerah yang jauh juga umumnya mengindikasikan perbedaan budaya dan lingkungan yang cukup signifikan dibanding daerah asal. Dampaknya migran perlu usaha lebih untuk melakukan adaptasi baik secara sosial maupun ekonomi. Kedua, efek penurunan kemiskinan pada kasus migrasi individu bekerja lebih baik dibandingkan kasus migrasi keluarga. Migrasi yang melibatkan seluruh anggota keluarga nampaknya lebih banyak mengalami hambatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Ketiga, migran yang berpindah dari perkotaan ke perkotaan mengalami efek penurunan kemiskinan lebih tinggi dibandingkan migran yang berpindah dari perdesaan ke perkotaan. Migran dari perdesaan pada umumnya akan memiliki lebih banyak hambatan seperti tingkat pendidikan yang rendah, modal migrasi yang minim, serta perbedaan budaya antara kehidupan perdesaan dan perkotaan.

Priseptian dan Primandhana (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar

56,10 persen atau separuh penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Menurut Panjawa (2020) menurunkan kemiskinan dalam tingkatan regional perlu dilakukan dalam upaya mendistorsi kemiskinan dalam skala nasional. Kemiskinan regional merupakan masalah yang kompleks karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Zhou dan Zhu, 2022). Kemiskinan perkotaan pada dasarnya lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan pedesaan (Sun dkk., 2012). Penelitian kemiskinan perkotaan yang dijelaskan oleh Mitlin dan Satterhwaite (2012) dalam “Urban Poverty in the Global South: Scale and Nature” menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan penting untuk dilakukan karena kemiskinan di perkotaan melibatkan permasalahan seperti kurangnya akses terhadap layanan penting, tidak memiliki akses terhadap pasokan air bersih yang memadai dan tidak memiliki fasilitas sanitasi dan drainase, serta ketidakpastian mengenai kepemilikan lahan. Untuk mengatasi kemiskinan perkotaan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan jangka panjang dengan memperbaiki perumahan, meningkatkan layanan dasar, meningkatkan kesempatan kerja, dan akses kredit. Menurut Mitlin dan Satterhwaite (2012), pertumbuhan pesat kota dapat menjadi pemicu kemiskinan di perkotaan karena meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur, perumahan, dan lapangan kerja. Perkembangan kota-kota terlihat melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat sehingga menciptakan dinamika perkotaan seperti perubahan penggunaan lahan, munculnya permukiman legal dan ilegal, serta permasalahan lain (Fikri dkk., 2016). Wilayah perkotaan yang semakin

berkembang menyebabkan berkembangnya heterogenitas yang menunjukkan perbedaan sosial penduduknya (Mc Gee, 1995). Baharoglu dan Kessides (2001) memperjelas fenomena kemiskinan di perkotaan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan kondisi ketidakamanan, isolasi, dan ketidakmampuan memiliki standar hidup layak yang disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan.

Proses urbanisasi sendiri melibatkan dimensi fisik, demografi sosial, ekonomi dan politik. Meskipun migrasi penduduk dari desa ke kota memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan, namun dua faktor yang lain tidak bisa diabaikan. Menurut Peraturan dari Kepala Badan Pusat Statistik (PERKA, 2020) menggambarkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun (2010-2020) untuk seluruh Indonesia terdapat peningkatan jumlah desa perkotaan sebesar 13.854, yang awalnya 15.786 desa perkotaan pada tahun 2010 menjadi 29.640 pada tahun 2020. Sementara pedesaan mengalami pengurangan jumlah sebesar 7.043 desa pedesaan dari 61.340 pada tahun 2010 menjadi 54.297 pada tahun 2020. Dengan demikian terdapat 7.043 pedesaan yang beralih menjadi desa perkotaan serta terdapat desa perkotaan baru lain yang sebagian terbentuk umumnya karena adanya pemekaran wilayah.

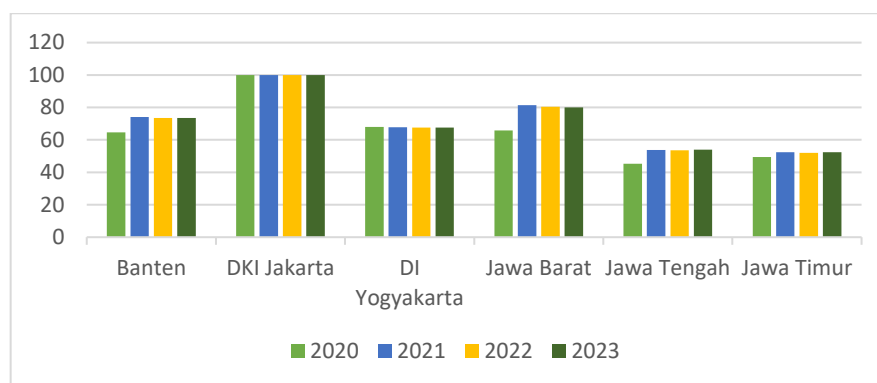
Tingginya populasi penduduk perkotaan pulau jawa mengindikasikan telah terjadi aliran perpindahan penduduk menuju pusat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang melampaui kapasitas daya tampung wilayah dapat berdampak negatif bagi wilayah konsentrasi itu sendiri maupun wilayah yang ditinggalkan. Pesatnya proses urbanisasi akibat pemusatan penduduk di perkotaan, secara fisik

ditandai dengan hal-hal meluasnya perkotaan ke wilayah sekitarnya sehingga membentuk kawasan metropolitan ataupun megapolitan, meluasnya perkembangan fisik perkotaan ke kawasan suburban dan perdesaan sehingga jumlah desa-kota meningkat, terjadinya reklasifikasi kawasan perdesaan menjadi perkotaan terutama di Pulau Jawa, kecenderungan penurunan pertumbuhan penduduk di kota inti metropolitan, sebaliknya terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di daerah sekitarnya dan meningkatnya alih fungsi lahan di kawasan perdesaan yang mengalami proses pengkotaan (Malamassam, 2016).

Menurut World Bank (2019) berjudul *Realizing Indonesian's Urban Potential*, ledakan urbanisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1980-1990. Dalam kurun waktu ini, kota-kota di Indonesia mengalami pertumbuhan urbanisasi sebesar tiga persen setiap tahunnya. Matriks ini dihitung dari pertumbuhan populasi yang tinggal di daerah perkotaan. Pertumbuhan urbanisasi Indonesia dalam sepuluh tahun itu jauh lebih pesat daripada China. World Bank juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun. Jumlah itu setara dengan 70% dari total populasi Indonesia pada tahun 2023 yang diperkirakan sebanyak 273 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan akan terus meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah populasi yang tinggal di perkotaan diperkirakan telah mencapai 57,3% dari populasi total Indonesia Badan Pusat Statistik (2020).

Beban kemiskinan ini juga diperkuat dengan adanya urbanisasi, dimana masyarakat berlomba-lomba mencari penghidupan di kota-kota besar yang

menjanjikan kehidupan lebih baik (Hugo, G. 2014). Akibatnya beban perkotaan menjadi lebih berat, sementara sektor pertanian menjadi terabaikan. Transformasi pertanian dan industrialisasi juga tidak berjalan dengan mulus bukan saja karena banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi, tetapi juga karena faktor teknologi termasuk pendanaan agar pertanian tersebut dapat dikelola secara baik (Kuncoro, M., & Suraya, E (2010).



Gambar 1.3
Urbanisasi 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2023
(% Populasi di Daerah Perkotaan)

Sumber: *Global Data Lab*, diolah

Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa urbanisasi di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam tingkat urbanisasi di berbagai provinsi Pulau Jawa. DKI Jakarta tetap memiliki tingkat urbanisasi sempurna sebesar 100% sepanjang periode tersebut, mencerminkan bahwa hampir seluruh populasi kota ini tinggal di area yang berurbanisasi hal ini sejalan dengan statusnya sebagai ibu kota dan pusat ekonomi utama. Banten mengalami fluktuasi signifikan, dengan tingkat urbanisasi meningkat dari 64,6% pada 2020 menjadi 74,2% pada 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 73,5% pada 2022 dan tetap stabil di 73,5% pada 2023. Ini menunjukkan perkembangan pesat dalam urbanisasi, meskipun ada penurunan

minor yang mungkin disebabkan oleh perubahan dalam distribusi populasi dan pembangunan infrastruktur. DI Yogyakarta menunjukkan tingkat urbanisasi yang relatif stabil, mulai dari 67,9% pada 2020, sedikit menurun menjadi 67,7% pada 2021, kemudian turun menjadi 67,5% pada 2022, dan sedikit meningkat menjadi 67,6% pada 2023. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi dalam pertumbuhan urbanisasi, kemungkinan dipengaruhi oleh pembatasan pertumbuhan dan kebijakan perencanaan kota. Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dalam urbanisasi, dari 65,9% pada 2020 menjadi 81,5% pada 2021, dengan sedikit penurunan menjadi 80,5% pada 2022 dan 80% pada 2023. Peningkatan ini menandakan transformasi besar dalam urbanisasi yang didorong oleh ekspansi kawasan urban dan perkembangan ekonomi. Jawa Tengah menunjukkan peningkatan urbanisasi dari 45,3% pada 2020 menjadi 54% pada 2023, dengan fluktuasi kecil sepanjang periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan urbanisasi yang lebih lambat dibandingkan provinsi lain. Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan urbanisasi dari 49,5% pada 2020 menjadi 52,3% pada 2023, dengan fluktuasi minor, mencerminkan pertumbuhan yang stabil namun tidak sepesat beberapa provinsi lainnya. Secara keseluruhan, perbedaan dalam tingkat urbanisasi ini menggambarkan variasi dalam proses urbanisasi di Pulau Jawa, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti infrastruktur, dan kebijakan perencanaan kota yang berbeda di setiap provinsi.

Tercatat tingkat urbanisasi khususnya yang terjadi di ibukota Jakarta tiap tahun angka nya meningkat. Jakarta menjadi destinasi para penduduk desa dikarenakan salah satunya karena adanya kekhususan wilayah yang dimiliki oleh

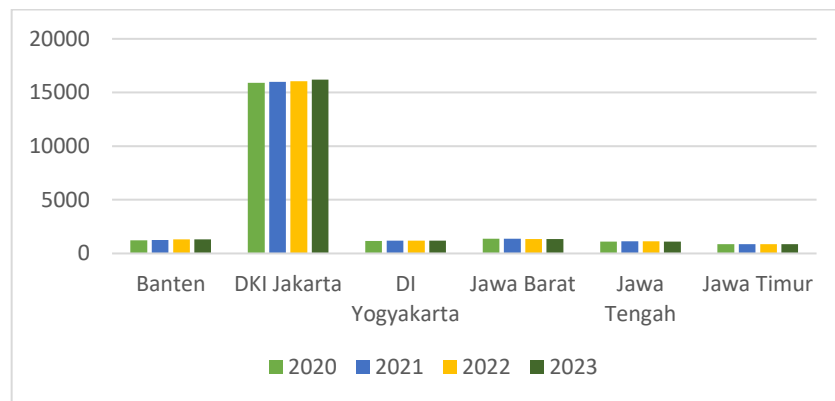
Jakarta yang itu akhirnya mempengaruhi perputaran ekonomi yang cukup pesat dan menjanjikan penduduk luar Jakarta untuk pindah dan mengadu nasib disana. Penulisan makalah ini akan menjelaskan peningkatan angka urbanisasi di DKI Jakarta 10 tahun terakhir khusus nya pada tahun 2023, masuknya penduduk dari luar Jakarta tentunya akan menambah bobot kepadatan penduduk yang berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial sebelumnya seperti kriminalitas, pengangguran, bangunan illegal serta kemacetan (Zaera, 2024).

Menurut Guinness World Record (2010) berpendapat bahwa tercatat Pulau Jawa sebagai Pulau dengan penduduk terpadat di dunia dengan populasi 147 juta jiwa/ tahun 2010 dan semuanya tinggal di wilayah seluas 127.569 km². Kepadatan penduduk di wilayah Pulau Jawa tercatat sebesar 1.015,9 jiwa/kilometer² pada tahun 2021. Beberapa faktor yang menyebabkan Pulau Jawa padat penduduknya yaitu, sebagian besar lokasi di wilayah Pulau Jawa mudah terjangkau, pulau jawa menjadi pusat perkembangan politik pada masa Hindu, Buddha, Islam dan masa penjajahan. Menurut Kemendikbud RI (2023) menyatakan bahwa distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara apakah tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan beberapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik memiliki sumber daya fisik maupun sumber daya manusia hal ini cenderung dipadati penduduk.

Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang

menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah seperti Papua yang memiliki kepadatan penduduk 25 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk 11 jiwa/km² disusul dengan Kalimantan Utara, Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Maluku dan Bengkulu. Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta mencapai 14.469 jiwa/km². Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Papua Barat hanya 8 jiwa/kilometer² (BAPPEDA 2014).

Persebaran penduduk Indonesia tidak merata karena banyak faktor diantaranya yaitu, kondisi geografis vegetasi yang berbeda-beda di setiap wilayah menyebabkan jumlah penduduk tidak merata, pembangunan ekonomi daerah yang memiliki infrastruktur, industri, dan lapangan kerja yang maju cenderung menarik penduduk untuk tinggal disana, perbedaan tingkat pembangunan fisik daerah yang memiliki infrastruktur yang lebih maju, seperti jaringan transportasi yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses ke teknologi informasi, perbedaan tingkat pendidikan daerah yang memiliki sekolah atau perguruan tinggi yang berkualitas cenderung menarik mahasiswa dari luar daerah. Kepadatan penduduk yang tinggi sering kali menambah tekanan pada infrastruktur, meningkatkan biaya hidup, dan memperburuk ketidakmerataan pendapatan (Firman, T. 2014).



Gambar 1.4

Kepadatan Penduduk 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2023 (Jiwa/km²)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan gambar 1.4, kepadatan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan variasi tahunan di setiap provinsi. DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara semua provinsi, dengan angka 15.907 jiwa/km² pada tahun 2020 dan meningkat sedikit menjadi 16.206 jiwa/km² pada tahun 2023. Angka yang sangat tinggi ini mencerminkan tingkat urbanisasi dan konsentrasi penduduk yang ekstrem di ibu kota, yang merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya Indonesia. Banten menunjukkan kepadatan penduduk yang signifikan dengan angka yang meningkat dari 1.232 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 1.316 jiwa/km² pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk di wilayah yang relatif padat ini, mungkin sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di sekitarnya. D.I Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk yang stabil namun relatif tinggi, dengan angka meningkat dari 1.171 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 1.198 jiwa/km² pada tahun 2023. Stabilitas ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang terkelola dengan baik di provinsi ini yang merupakan pusat pendidikan dan pariwisata utama di Indonesia. Jawa Barat menunjukkan

kepadatan penduduk yang relatif tinggi, dengan angka meningkat dari 1.365 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 1.350 jiwa/km² pada tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi kecil, angka ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang signifikan, berhubungan dengan pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat di provinsi ini. Jawa Tengah mengalami penurunan kepadatan penduduk dari 1.113 jiwa/km² di tahun 2020 menjadi 1.093 jiwa/km² pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran penduduk atau perubahan dalam distribusi populasi di provinsi ini, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan migrasi. Jawa Timur menunjukkan kenaikan kepadatan penduduk dari 851 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 875 jiwa/km² pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil dan peningkatan kepadatan penduduk, yang mungkin terkait dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi di provinsi ini. Kesimpulannya, DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, mencerminkan urbanisasi ekstrem dan konsentrasi penduduk yang tinggi di ibu kota. Provinsi Banten dan Jawa Barat juga menunjukkan tingkat kepadatan yang signifikan dengan tren yang meningkat, menunjukkan pertumbuhan urbanisasi dan populasi yang pesat. D.I Yogyakarta menunjukkan kepadatan yang relatif stabil, sedangkan Jawa Tengah mengalami penurunan, mungkin karena perubahan distribusi populasi. Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan kepadatan yang stabil, mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk yang positif. Kepadatan penduduk di Jakarta tentunya akan menentukan ketersediaan rumah yang dimana pendatang biasanya akan sangat kesulitan untuk dapat memiliki rumah di Jakarta. Kepadatan penduduk ini

merupakan cabang masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Kepadatan penduduk yang disebabkan adanya urbanisasi berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Jakarta. Karena mayoritas pendatang dari penduduk desa yang bermigrasi ke kota Jakarta tidak dibekali dengan memiliki kemampuan khusus maupun tidak memiliki pendidikan yang baik, sehingga ketika datang ke Jakarta akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen atau sekitar 477,8 ribu (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023) (Zaera, 2024).

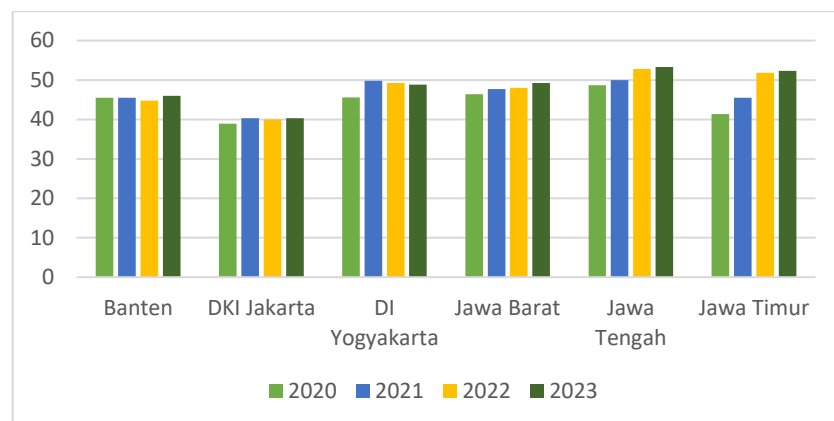
Perbedaan dalam kepadatan penduduk ini menyoroti variasi dalam pertumbuhan populasi dan urbanisasi di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Penyebab lain tingginya angka tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan. Di Negara maju pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh investasi, teknologi yang tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas, akan tetapi di negara berkembang dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan tidaklah demikian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan berada pada peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (World Bank, 2019). Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia terus terjadi di setiap tahun. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 jiwa kemudian meningkat tajam menjadi 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 (BPS, 2012) dan pada tahun 2019, penduduk Indonesia

diperkirakan mencapai angka 267 juta jiwa. Secara demografi, jumlah penduduk di suatu wilayah akan selalu berubah perubahannya diakibatkan oleh bekerjanya 2 komponen utama dalam demografi yaitu fertilitas dan mortalitas. Perubahan pada kedua komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah penduduk dan struktur umur penduduk. Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035, menunjukkan proporsi penduduk Indonesia usia dibawah 15 tahun semakin mengecil sedangkan proporsi penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) semakin membesar, sementara lansia juga perlahan-lahan semakin meningkat. Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat, jika tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan menimbulkan dampak negatif, menghambat pembangunan ekonomi, dan dapat menjadi beban pada wilayah tersebut manakala kualitas penduduknya rendah dan tidak produktif (Panggabean, 2020). Menurut Todaro (2000) menyatakan salah satu penyebab menurunnya prospek pembangunan disebabkan oleh tiga hal yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat, terkonsentrasinya penduduk di daerah perkotaan dan beban tanggungan penduduk usia produktif semakin tinggi.

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan rasio antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 dan 65+ tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menggambarkan semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia. Tingginya rasio ketergantungan dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif, apabila dengan

tanggungan penduduk yang kecil maka akan lebih mudah memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Pada rasio ketergantungan penduduk yang rendah terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan penduduk, hal ini selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup (*life expectancy*) di wilayah tersebut (Andi Nurul Adiana Reski Agus, 2016).

Dalam beberapa penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka beban tanggungan. Rasio Ketergantungan yang ada di Indonesia. Sehingga muncul program Keluarga Berencana (KB) dan sekarang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2017).



Gambar 1.5
Rasio Ketergantungan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2023 (%)
 Sumber: *Global Data Lab*, diolah

Berdasarkan gambar 1.5 diatas, rasio ketergantungan di Pulau Jawa menunjukkan fluktuasi tahunan. Banten menunjukkan fluktuasi minor dalam Rasio

Ketergantungan, dengan angka yang stabil di 45,5% pada 2020 dan 2021, menurun sedikit menjadi 44,8% pada 2022, dan meningkat kembali menjadi 46% pada 2023. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan perubahan kecil dalam struktur demografis dan rasio ketergantungan di provinsi ini. DKI Jakarta memiliki Rasio Ketergantungan yang relatif stabil namun menunjukkan peningkatan dari 38,9% pada 2020 menjadi 40,3% pada 2023, dengan sedikit penurunan di tahun 2022. Meskipun berada di angka yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, Rasio Ketergantungan di Jakarta meningkat secara perlahan, menunjukkan adanya perubahan dalam proporsi penduduk yang bergantung pada penduduk produktif di ibu kota.

D.I Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dalam Rasio Ketergantungan, dari 45,6% pada 2020 menjadi 48,8% pada 2023, dengan lonjakan tajam pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan tantangan demografis yang dihadapi D.I Yogyakarta, mungkin karena perubahan dalam struktur populasi atau peningkatan proporsi penduduk yang tidak produktif. Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dalam Rasio Ketergantungan, dari 46,4% pada 2020 menjadi 49,2% pada 2023, dengan kenaikan bertahap setiap tahunnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi penduduk yang bergantung pada penduduk produktif, mungkin dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi yang tidak seimbang. Jawa Tengah memiliki Rasio Ketergantungan yang terus meningkat dari 48,7% pada 2020 menjadi 53,3% pada 2023, dengan lonjakan yang signifikan pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan tantangan besar dalam mengelola proporsi penduduk produktif terhadap penduduk yang bergantung, menunjukkan

kemungkinan adanya tekanan demografis yang meningkat di provinsi ini. Jawa Timur mengalami peningkatan Rasio Ketergantungan dari 41,4% pada 2020 menjadi 52,3% pada 2023, dengan lonjakan tajam pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam struktur demografis, yang mungkin disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang atau peningkatan jumlah penduduk yang bergantung.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan urbanisasi di Pulau Jawa, terdapat perubahan signifikan dalam kepadatan penduduk dan rasio ketergantungan, yang berdampak langsung pada kondisi sosial wilayah tersebut. Urbanisasi yang meningkat sering kali memperburuk masalah kepadatan penduduk, sehingga menambah tekanan pada infrastruktur dan meningkatkan tantangan terkait kemiskinan (Nugroho, A., & Setiawan, E. 2020).

Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, tantangan seperti akses terbatas terhadap layanan dasar, biaya hidup yang meningkat, dan ketidakmerataan pendapatan menjadi semakin nyata. rasio ketergantungan dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif, apabila dengan tanggungan penduduk yang kecil maka akan lebih mudah memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana urbanisasi, kepadatan penduduk, dan rasio ketergantungan memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan menganalisis data dari tahun 2006 hingga 2021, penelitian ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan secara parsial Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023?
2. Bagaimana pengaruh Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan indikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui pengaruh Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan secara parsial Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023
2. Mengetahui pengaruh Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan tentang topik yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi, dengan harapan bisa menerapkan hasil tersebut secara efektif dalam keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah atau instansi terkait diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan terkait untuk mengatasi tingkat kemiskinan khususnya di 6 Provinsi di wilayah Pulau Jawa sebagai masalah serius yang harus segera diatasi untuk perkembangan suatu perekonomian di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau literatur yang penting bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik yang sama atau serupa. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau pembandingan untuk studi-studi berikutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil penulis pada penelitian ini berada di 6 Provinsi wilayah Pulau Jawa.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024/2024. Penelitian ini dimulai dengan pengajuan judul kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan pada bulan November 2023.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

	Kegiatan	November 2023-Mei 2024				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan dan Pengesahan Judul																																
2	Pengumpulan Data																																
3	Penyusunan Proposal Skripsi dan Bimbingan																																
4	Seminar Usual Penelitian																																
5	Pengolahan Data																																
6	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																																
7	Sidang Skripsi																																
8	Revisi Skripsi																																